

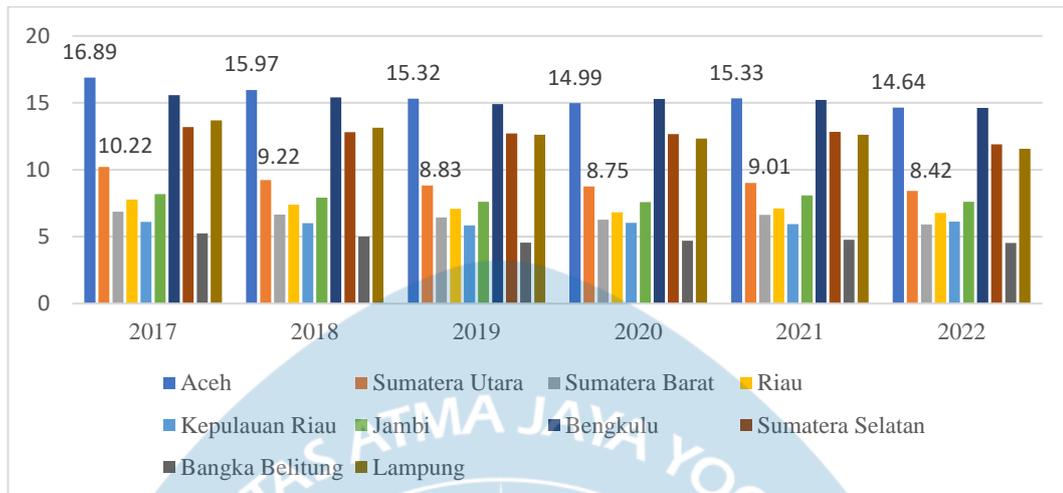
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah permasalahan ekonomi yang kompleks dan fundamental di negara – negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Menurut Todaro & Smith (2011), kemiskinan merupakan total orang yang kurang mampu untuk memperoleh sumber daya dalam mencukupi kebutuhan dasar sehari – hari. Adapun dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2022), Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) di mana kemiskinan dianggap sebagai keterbatasan dari segi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dihitung dari sisi pengeluaran. Tinggi rendahnya taraf kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar disesuaikan dengan aspek krusial kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

Tingkat kemiskinan suatu daerah dapat dilihat dari persentase penduduk miskin pada daerah tersebut (Azmi, 2019: 237). Dilansir dari BPS Provinsi Jawa Timur (2022), Persentase Penduduk Miskin (PPM) adalah persentase penduduk ketika berada di bawah garis kemiskinan. Dilansir dari laman databoks.katadata.co.id (2023), Pulau Sumatra menjadi wilayah dengan mayoritas kota termiskin di Indonesia. Adapun data dari BPS Bengkulu (2023), terungkap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatra seperti yang disajikan dalam Gambar 1.1.



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2023 (diolah).

Gambar 1. 1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatra Tahun 2017 – 2022

Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa Aceh menempati peringkat teratas untuk persentase penduduk miskin tertinggi selama enam tahun berturut – turut. Kisaran persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 14,64% pada tahun 2022 sampai 16,89% pada tahun 2017 melebihi persentase penduduk miskin nasional (kisaran 9,5% - 10,65%). Sementara itu, Sumatera Utara berada pada posisi menengah, yaitu ke-5 dengan kisaran persentase penduduk miskin sebesar 8,42% pada tahun 2022 sampai 10,22% pada tahun 2017. Meskipun Sumatera Utara diketahui sebagai provinsi dengan pendapatan daerah terbesar di Pulau Sumatra, kemiskinan masih menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah tersebut. Dikutip dari laman berita Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada forum yang mengambil tema, “Transformasi Ekonomi, Stabilitas Politik, dan SDM yang Berkualitas” (2023), salah satu fokus utama dari Sumatera Utara yang harus diselesaikan adalah memaksimalkan penurunan penduduk miskin. Dengan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Sumatera Utara, pemerintah perlu

memberikan jaminan sosial melalui kebijakan – kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal dan tantangan sosial sehingga mampu mendorong desentralisasi pembangunan (Jolianis, 2016: 193).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan memperluas dasar otonomi daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota (Fitriyanti & Handayani, 2020: 79). Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa memperluas otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pembangunan yang merata untuk setiap daerah. Otonomi daerah yang terlaksana dengan baik dapat terlihat dari kemampuan keuangan daerahnya masing-masing dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dan mampu mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat (Kamaroellah, 2017: 126). Dalam rangka meringankan kebutuhan daerah untuk mengentaskan kemiskinan, pendapatan daerah sangat berperan penting di dalamnya (Nugroho, 2022: 1).

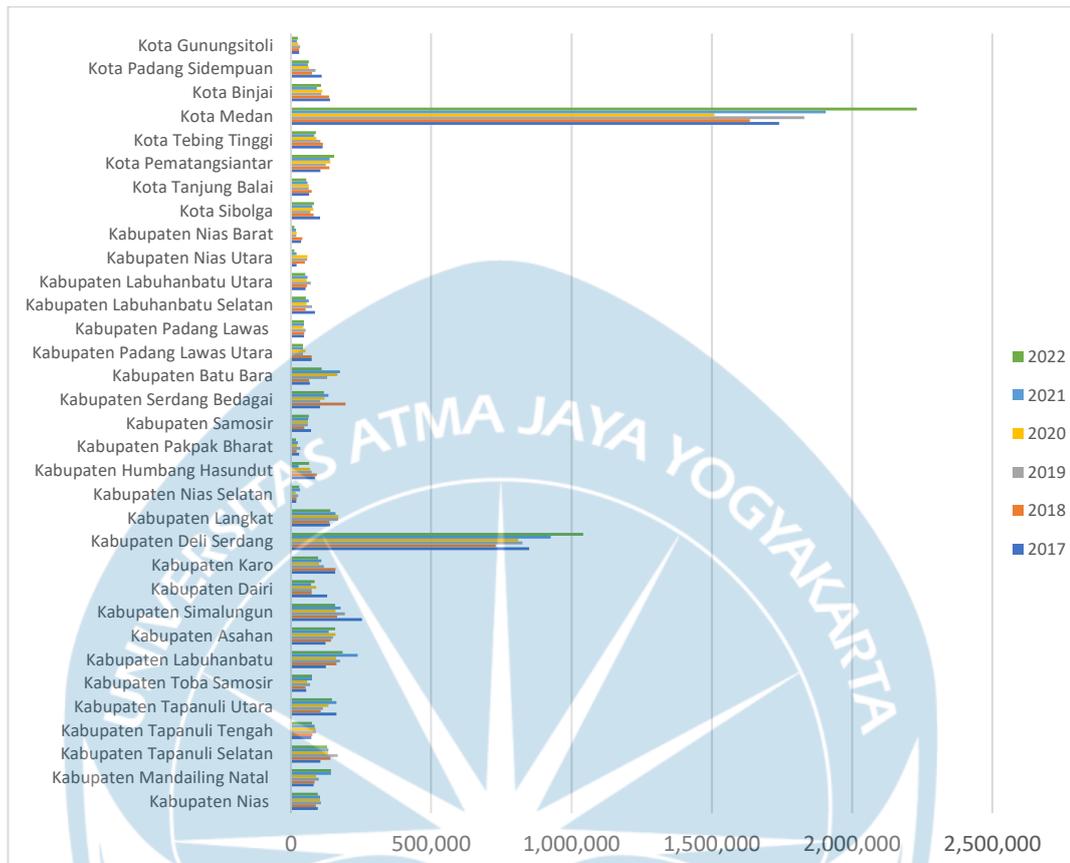
Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023), sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai bagian dari Dana Perimbangan. PAD berasal dari pajak, retribusi, dan hasil sumber daya alam lokal meningkatkan fleksibilitas keuangan daerah. Adapun data realisasi PAD (dalam Triliun Rupiah) di Pulau Sumatra dari Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) sebagai berikut.



Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sumatra Tahun 2017 - 2022

Dari gambar di atas, terlihat bahwa PAD dari Sumatera Utara adalah PAD tertinggi dibandingkan provinsi lain dari 2017 hingga 2022. Dari 2017 – 2019, PAD Sumatera Utara selalu mengalami kenaikan. Walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 karena adanya guncangan (*shock*) Covid-19, di mana terjadi pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi berdampak pada merosotnya setiap sektor perekonomian, PAD di Sumatera Utara pada tahun – tahun selanjutnya selalu meningkat dan tetap menjadi provinsi dengan PAD tertinggi di Pulau Sumatra. Menurut Lubis dkk. (2024: 723), pengelolaan PAD yang efisien dapat berdampak langsung pada pemerintah daerah yang mampu menghasilkan program – program anti kemiskinan. Sayangnya, Sumatera Utara masih dihadapkan pada ketidaksetaraan pembangunan wilayah karena alokasi pendapatan daerah tidak sama untuk setiap daerah. Berikut realisasi dari PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022 pada Gambar 1.3.

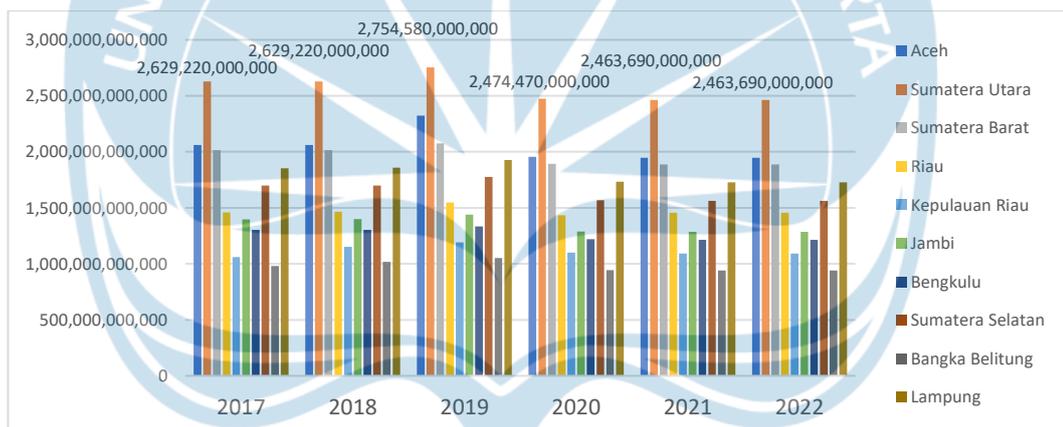


Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

Dari Gambar 1.3, terlihat jelas ada ketimpangan yang signifikan di beberapa kota/kabupaten. Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan menjadi tiga daerah dengan PAD terendah dibandingkan daerah lainnya. Adapun Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun menjadi tiga daerah dengan PAD tertinggi di Sumatra Utara. Akibatnya, ada beberapa kabupaten/kota merasakan dampak positif yang begitu besar dari alokasi dana, sedangkan ada daerah lain yang tertinggal dan tidak terlalu merasakan pembangunan ekonomi yang signifikan di daerahnya.

Banyaknya kabupaten/kota membuat pemerataan perekonomian daerah menjadi lebih kompleks. Pengelolaan anggaran pun perlu dioptimalkan dari segi penerimaan daerahnya sendiri, yaitu sektor PAD. Tidak hanya PAD, DAU dan DAK juga menjadi bagian dari pendapatan daerah untuk kelancaran pembangunan sarana dan prasarana untuk pemerintah maupun publik. DAU berasal dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhina & Syafitri, 2024: 440). Berikut realisasi DAU (dalam Triliun Rupiah) di Pulau Sumatra sebagai berikut.

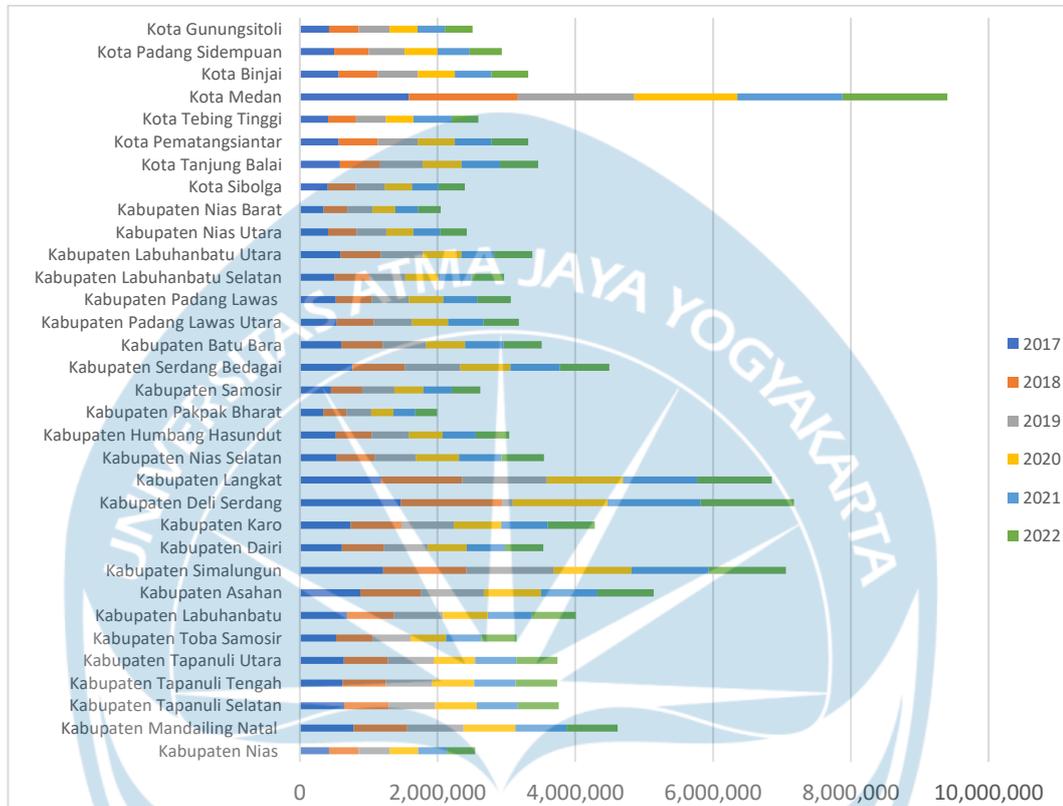


Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 4. Realisasi Dana Alokasi Umum di Pulau Sumatra Tahun 2017 – 2022

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan DAU tertinggi dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sumatra. DAU pada tahun 2017 sampai 2019 sempat meningkat. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 karena Covid-19. Kemudian terus menurun perlahan sampai tahun 2022 menjadi Rp2.463.690.000.000,00. DAU mampu memengaruhi pengentasan kemiskinan masyarakat secara signifikan (Ramadhina & Syafitri, 2024: 440).

Adapun realisasi dari DAU di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022 pada Gambar 1.5.

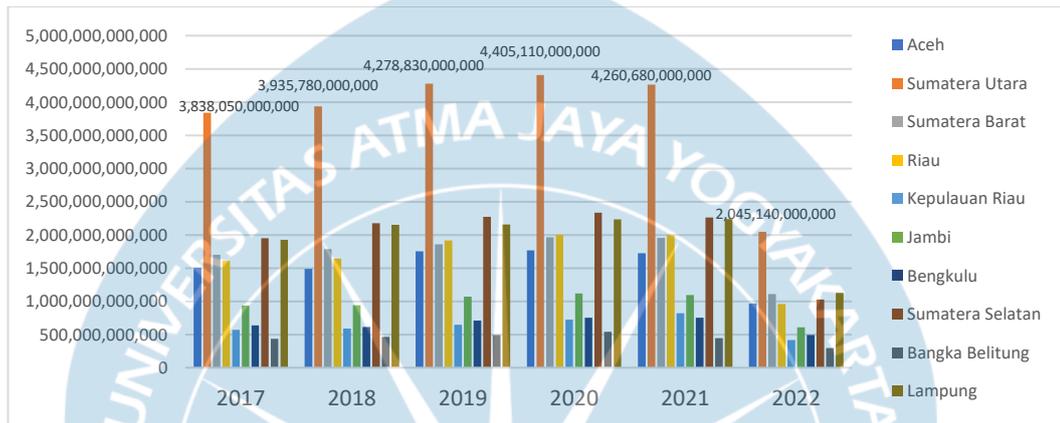


Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 5. Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

Gambar 1.5 menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan di beberapa kota/kabupaten. Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara menjadi tiga daerah dengan DAU terendah dibandingkan daerah lainnya. Sementara, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Simalungun menjadi tiga daerah dengan DAU tertinggi di Sumatra Utara. Selain DAU, DAK merupakan dana yang juga ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program pendidikan (Ramadhina & Syafitri, 2024:

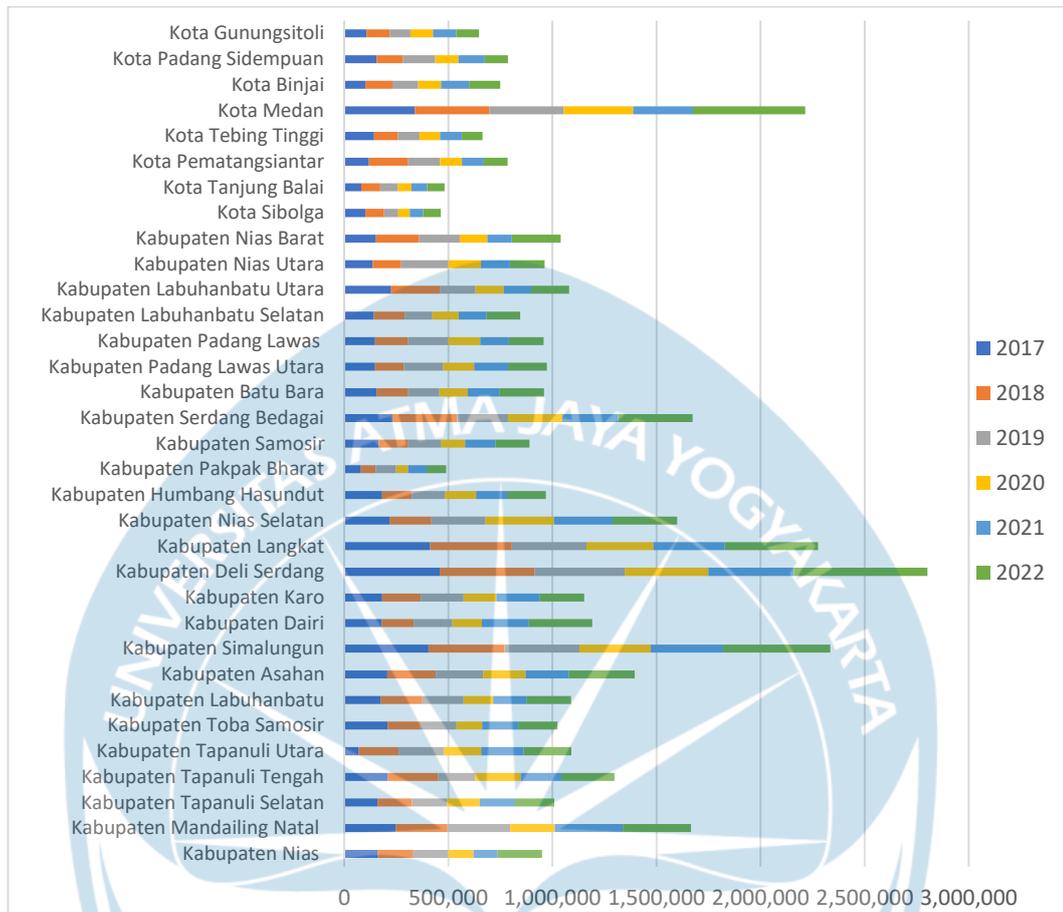
441). Tingginya DAK yang diterima oleh pemerintah daerah mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah sehingga aktivitas pembangunan tetap berlangsung dengan baik (Murti dkk., 2023: 15). Berikut realisasi DAU (dalam Triliun Rupiah) di Pulau Sumatra sebagai berikut.



Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 6. Realisasi Dana Alokasi Khusus di Pulau Sumatra Tahun 2017 – 2022

Berdasarkan Gambar 1.6, terlihat bahwa Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan DAU tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Sumatra. DAU dari 2017 – 2020 selalu meningkat, puncaknya pada tahun 2020 sebesar Rp4.405.110.000.000,00. Namun, DAU menurun sedikit pada tahun 2021. Penurunan signifikan justru terjadi pada tahun 2022 menyisakan Rp2.045.144.000.000,00. Maka, pengendalian dana PAD yang didapat dari potensi daerah serta DAU dan DAK dari pemerintah pusat diharapkan mampu berdampak pada besar kecilnya penduduk miskin di setiap daerah. Adapun realisasi dari DAK di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2022 pada Gambar 1.7.



Sumber: Portal DJPK Kementerian Keuangan, 2022 (diolah).

Gambar 1. 7. Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Sumatra Utara Tahun 2017 – 2022 (dalam Miliar Rupiah)

Gambar 1.7 menunjukkan adanya ketimpangan di beberapa kota/kabupaten. Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Pakpak Bharat menjadi tiga daerah dengan DAK terendah dibandingkan daerah lainnya. Sementara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Langkat menjadi tiga daerah dengan DAU tertinggi di Sumatra Utara.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, terungkap bahwa PAD, DAU, dan DAK Provinsi Sumatra Utara menempati peringkat teratas dibandingkan provinsi lainnya. Namun, tingkat kemiskinan Sumatra Utara masih berada pada

tingkat menengah, artinya belum ada penurunan signifikan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2017 – 2022. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara dalam merancang kebijakan pembangunan dan mengelola keuangan secara tepat. Dengan demikian, tingkat produktivitas perekonomian yang lebih tinggi dari pengelolaan pendapatan daerah secara tepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan (Nany dkk., 2022: 249).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu materi diskusi dan alternatif solusi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti PAD, DAU, dan DAK di daerahnya agar mampu menghasilkan program – program kemiskinan yang lebih efektif dan efisien.
2. Peneliti, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai bekal acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu ekonomi, industri, dan menjadi referensi pembelajaran bagi para akademisi agar lebih baik lagi penelitiannya.
3. Pembaca, diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman pembaca tentang peran dan dampak PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemiskinan, serta menambah wawasan tentang kebijakan keuangan daerah.

1.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dan berbagai pertimbangan penelitian terdahulu serta teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa variabel PAD memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.
2. Diduga bahwa variabel DAU memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.
3. Diduga bahwa variabel DAK memiliki pengaruh negatif tingkat kemiskinan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara tahun 2017 – 2022.

1.6. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan teori – teori berdasarkan bukti empiris tentang desentralisasi fiskal, meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dalam kaitannya dengan tingkat kemiskinan yang dilihat dari persentase penduduk miskin.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini mencakup data dan sumber data yang digunakan. teknik analisis data. metode analisis data. serta tahapan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari tahapan analisis data menggunakan model dan alat analisis yang telah diestimasi.

BAB V PENUTUP

Bab V merangkum kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan saran kepada pemangku kepentingan yang relevan.

